



Perencanaan dan Pengelolaan Dana Infrastruktur Desa di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017

Fauzan Fauzan¹, Dicky Armanda², Muhaddis³, Nurmasyahyati⁴

^{1,3,4},Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Indonesia

Korespondensi Penulis : almuhaddis5@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the planning and management strategy of infrastructure fund allocation in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency. This research was conducted in Pasar Simpang Tiga Village, Bener Meriah Regency. The research aims to understand the stages of planning and management of the infrastructure budget in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency, as well as its impact on infrastructure development in the region. In this study, the researcher applies a qualitative approach with a descriptive analysis method. Data collection was carried out by conducting observations, interviews, and documentation studies. The results of the study show that in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency, the planning and management process of village infrastructure funds uses the musrembang method. In this method, planning uses a top-down and bottom-up planning model that refers to the Bener Meriah Regency RPJM, the Bener Meriah Regency RPJMDesa, and the Bener Meriah Regency RTRW. The planning at Simpang Tiga Market was led by a team consisting of eleven members, including village reje, petue, kaur pembangunan, kaur evaluasi, imem, and other figures. The results of the village meeting are then submitted to the sub-district to be evaluated and adjusted to the needs of the community. The impact of planning and management of village infrastructure funds in Pasar Simpang Tiga Village, Bukit District, Bener Meriah Regency has accelerated the development process in the village, both physically and non-physically. The positive impact of this is the increase in Village Original Income (PAD) of Pasar Simpang Tiga Village. However, the negative impact is the lack of optimal planning in prioritizing programs that are in accordance with the livelihood of the majority of the residents of Pasar Simpang Tiga Village, most of whom are palawija farmers such as potatoes, kul, carrots, red chilies, and green chilies, so this is not optimal in increasing the PAD of Pasar Simpang Tiga.

Keywords: Planning, Management, Village Fund

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan dan pengelolaan alokasi dana infrastruktur di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini dilakukan di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian bertujuan untuk memahami tahapan perencanaan dan pengelolaan anggaran infrastruktur di Desa Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, serta dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, proses perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur desa menggunakan metode musrembang. Dalam metode ini, perencanaan menggunakan model perencanaan top down dan bottom up yang merujuk pada RPJM Kabupaten Bener Meriah, RPJMDesa, dan RTRW Kabupaten Bener Meriah. Perencanaan di Pasar Simpang Tiga dipimpin oleh tim yang terdiri dari sebelas anggota, termasuk reje kampung, petue, kaur pembangunan, kaur evaluasi, imem, serta tokoh-tokoh lainnya. Hasil rapat desa kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dampak perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur desa di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah telah mempercepat proses pembangunan di kampung tersebut, baik secara fisik maupun non fisik. Dampak positif dari hal ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Kampung Pasar Simpang Tiga. Namun, dampak negatifnya adalah kurang optimalnya perencanaan dalam memprioritaskan program yang sesuai dengan mayoritas mata pencaharian penduduk Kampung Pasar Simpang Tiga, yang sebagian besar adalah petani palawija seperti kentang, kul, wortel, cabai merah, dan cabai hijau, sehingga hal ini tidak maksimal dalam meningkatkan PAD pasar simpang tiga.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan suatu proses yang mengidentifikasi tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan menyiapkan rencana kegiatan kerja yang akan dilakukan oleh organisasi. Perencanaan adalah tahap yang esensial dari seluruh aspek manajemen karena tanpa perencanaan, aktivitas pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan tidak akan terlaksana dengan efektif.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang. NO. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk masa depan, dengan melakukan pilihan-pilihan secara berurutan. Menghitung dan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan dari perencanaan ini meliputi mendukung koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan pembangunan, memastikan terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang harmonis di antara Daerah.

Salah satu fokus utama yang diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia dengan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah pinggiran melalui penguatan daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun struktur fisik merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah guna memperkuat Wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi faktor utama dalam mendorong kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Pengembangan pedesaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna menciptakan masyarakat desa yang mampu menjaga keutuhan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, serta mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki 232 Desa di 10 Kecamatan dan melaksanakan amanat UU No. Peraturan pelaksana yang mendukung Desaserta tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Yang Berasal Dari Anggaran Belanja Dan Pendapatan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017. Peraturan ini memperkuat Desaserta tahun 2014 dengan menambahkan dua peraturan

pelaksana lainnya. Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bener Meriah mendapat dana, bersumber dari Dana Kampung (APBN) 738.638.638,00, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Rp. 5.792.000,00, dan Alokasi Dana Kampung Rp. 204.910.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp. 949.340.638,00 pada tahun 2017, dimana dana dimanfaatkan antara lain: penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pengembangan komunitas kampung, dan penguatan perempuan kampung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur Desa di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2017. Metode kualitatif biasanya sulit dibenarkan secara matematis. Sebaliknya, metode ini lebih berfokus pada menyampaikan perasaan atau wawasan yang diperoleh dari data sampel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan merupakan proses untuk memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan suatu kegiatan yang akan dilakukan dan menetapkan waktu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara peneliti di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah proses perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur desa menggunakan beberapa proses perencanaan antara lain: perencanaan teknokrat, perencanaan partisipatif, perencanaan *top-down* dan perencanaan *bottom up*. Tetapi pada penerapannya atau pelaksanaannya Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lebih berfokus pada perencanaan secara *top-down* dan *bottom up* dimana dapat dilihat dari di implementasikannya kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan pusat yang diterapkan di pemerintah daerah dimana diharapkan dengan adanya kebijakan ini mampu menjadi objek dan subjek pembangunan masyarakat di kampung-kampung, dimana kampung tidak lagi menjadi pihak penerima program, namun dapat merencanakan kegiatan kampung secara partisipatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang ada di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari panduan rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bener Meriah dan rancangan pembangunan jangka menengah desa serta rancangan pembangunan jangka pendek desa. Kampung Pasar Tiga melakukan perencanaan dengan pembentukan tim 11. Tim 11 dibentuk oleh aparaturnya kampung dengan ketua kampung. Lalu tim sebelas melakukan review RPJM, Menganalisis RPJM, Mencari informasi tentang pagu indikatif, mencari informasi tentang program sektoral yang masuk ke desa. Tim sebelas juga memiliki tugas mengevaluasi kegiatan program tahun sebelumnya

Proses perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur desa Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan cara musrembang desa dimana yang ikut didalamnya kepala desa, ketua, dengan membuat undangan Untuk mengembangkan rencana pembangunan jangka pendek desa, undang-undang ini harus melibatkan perwakilan dari elemen masyarakat, adat, agama, pemuda, perempuan, pendidikan, dan kesehatan.

Perencanaan dan pengelolaan dilakukan dengan cara musrembang internal terlebih dahulu dimana aparaturnya kampung setelah menyetujui RPJPDesa skala prioritas lima tahun membangun, lalu dilakukan pengiriman undangan untuk dilakukan musrembang menyeluruh, dimana tim sebelas memaparkan kepada masyarakat tentang prioritas pembangunan maka masyarakat yang ikut dalam musrembang dapat mengusulkan pembangunan yang akan direalisasikan terlebih dahulu sesuai dengan skala prioritas kampung.

Jadi hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwa perencanaan yang dianggarkan dari dana desa untuk infrastruktur tahun anggaran tahun 2017 adalah penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung (ruko, wisma dan drainase aliran limbah rumah tangga), pembinaan kemasyarakatan kampung (pelatihan bagi aparaturnya kampung) tetapi aparaturnya kampung pasar simpang tiga belum/tidak memprioritaskan pembangunan jalan/jembatan untuk akses kemudahan petani tanaman palawija dalam mengangkut barang dari perkebunan ke tengkulak (kentang, wortel, cabe hijau, cabe merah, bungan kembang kol). Tahun 2017 juga belum mengalokasikan dana untuk pelatihan pertanian khusus tanaman palawija, pengadaan bibit bagi petani.

Tanaman palawija merupakan mata pencarian mayoritas penduduk Kampung Pasar Simpang Tiga selain berdagang sehingga untuk menunjang perekonomian masyarakat aparaturnya

kampung juga harus memprioritaskan perencanaan alokasi dana desa pada bidang tanaman palawija di Kampung Pasar Simpang Tiga.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur Desa Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 menggunakan acuan Rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten dan Kampung serta untuk proses pelaksanaan beracu pada program sektorat dan Undang-Undang desa. Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017.
2. Dampak dari Proses perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 aparat desa tidak memiliki anggaran dalam kegiatan pembangunan tapi saat ini berlimpah. Desa sebagai ujung tombak pembangunan yang masyarakat pinggiran belum pernah menikmati bagaimana bernegara atau menikmati langsung anggaran yang di kelolah oleh desa tapi saat ini ikut langsung mengelolah anggaran. Dulu desa hanya ikut bersuadaya untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi sangat baik.

Saran

Perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur Desa Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah melakukan Proses Perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur desa di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 selanjutnya harus memprioritaskan akses kemudahan petani tanaman palawija seperti jalan dan jembatan. Penguatan anggaran diprioritaskan pada peningkatan SDM bagi petani.
2. Dampak Perencanaan dan pengelolaan dana infrastruktur desa di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 diharapkan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat yang menjadi kepentingan masyarakat Kampung Pasar Simpang Tiga khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Menejemen pemberdayaan*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Widjaja, A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Uno, H. B. (2009). *Teori motivasi dan pengukurannya (Analisis di bidang pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tomatala, Y. (2006). *Kepemimpinan yang dinamis (Aspek-aspek kepemimpinan)*. Malang: Gandum Mas.
- Terry, G., & Rue, L. W. (2010). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-prinsip manajemen (Cetakan 10)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sumarsono, S. (2010). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Sumarsono, S. (2010). *Menejemen keuangan pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar penelitian kualitatif: Tatalangkah dan teknik-teknik teorisasi data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2004). *Manajemen (Alih Bahasa, Jilid I, Edisi Ketujuh)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moekijat. (2000). *Kamus manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori makroekonomi (Edisi Kelima, Terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan pengendalian program pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar manajemen infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ja'far, M. (2007). *Infrastruktur pro rakyat: Strategi investasi infrastruktur Indonesia abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasibuan, M. (2000). *Manajemen sumber daya manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hadari, N. (2008). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djunaedi, A. (2012). Proses perencanaan wilayah dan kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Daft, R. L. (2010). Era baru manajemen (Buku 2, Edisi 9). Jakarta: Salemba Empat.

Atmosudirdjo. (2005). Sistem informasi manajemen.

Ali, F., & Alam, S. (2012). Study kebijakan pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Abdurrahman, D. (2003). Sejarah kebudayaan Islam dari masa klasik hingga modern. Yogyakarta: Fak Adab IAIN Sunan Kalijaga.